

**KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
INKLUSIF DI INDONESIA**



Oleh:

Eko Puji Lestari, S.Pd.I

NIM: 1420410150

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam**

YOGYAKARTA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eko Puji Lestari

NIM : 1420410150

Jenjang : Magister

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Yogyakarta, Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Eko Puji Lestari, S.Pd.I
NIM:1420410150

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eko Puji Lestari

NIM : 1420410150

Jenjang : Magister

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Eko Puji Lestari, S.Pd.I
NIM:1420410150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
INSKLUSIF DI INDONESIA
Nama : Eko Puji Lestari, S.Pd.I
NIM : 1420410150
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam
Tanggal Ujian : 24 Agustus 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Pendidikan (M.Pd)

Yogyakarta, 28 Agustus 2018

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
: INSKLUSIF DI INDONESIA
Nama : Eko Puji Lestari, S.Pd.I
NIM : 1420410150
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D



Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Maragustam, M.A



Penguji : Dr. Abdul Munip, S.Ag., M.Ag.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 2018

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil/Nilai : 89 / A-

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

Yang ditulis oleh,

Nama	: Eko Puji Lestari
NIM	: 1420410150
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi	: Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam (MKPI)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Pembimbing



Prof. Dr. H. Maragustam, M.A

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini penulis persembahkan untuk almamater tercinta UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu wujud tri darma
perguruan tinggi, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan
keilmuan. Terhusus untuk konsentrasi Manajemen dan Kebijakan
Pendidikan Islam.*

MOTTO

Jika tak mampu berlari, teruslah berjalan. Bukan seberapa cepat kamu dapat, namun seberapa tahan kamu berjuang.

Puput Suharto

ABSTRAK

Eko puji Lestari, 1420410150. *Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Indonesia*. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam. Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembimbing Prof. Dr. H. Maragustam, M.A

Jumlah anak usia pendidikan dasar dan menengah yang tidak sekolah masih tinggi di Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan, dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Selama ini penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas lebih banyak dilakukan di satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Padahal, tidak semua daerah di Indonesia memiliki SLB. Data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, 62 diantaranya tidak memiliki SLB. Jumlah 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesiapun baru 10 persen yang bersekolah di SLB.

Penelitian ini merupakan penelitian non interaktif (*non interactive inquiry*) disebut juga penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data, untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis isi atau dokumen (*content or document analysis*) ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian.

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang dimaksud pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor baik dalam maupun luar negeri. 2) secara keseluruhan penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat SMP di Indonesia belum sesuai dengan kebijakan yang ada. 3) Keadaan guru pendamping khusus yang ada belum memenuhi kualifikasi pendidik, serta keberadaannya (kuantitasnya) masih minim sehingga belum mencukupi kebutuhan peserta didik.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Inklusif

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	s (es dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet dengan titik dibawah
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidin 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------

C. Ta' Marbutah**1. Bila dimatikan ditulis h**

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserab kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	a
fathah + ya' mati	ditulis	jahiliyyah
يسعى	ditulis	a
Kasrah + ya' mati	ditulis	yas'a
كريم	ditulis	I
dammah + wawu mati	ditulis	Karim
فروض	ditulis	U
		Furud

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
fathah + wawu mati	ditulis	bainakum
قول	ditulis	au
		qaulum

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	a'antum u'idat la'in syakartum
----------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن القياس	ditulis ditulis	al-Qur'an al-Qiyas
------------------	--------------------	-----------------------

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Sama' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	zawi al-furud ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan yang tiada tara sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad saw, berikut para keluarga, keturunan, sahabat, tabiin, semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin....

Tesis ini dilatarbelakangi oleh pengalaman yang penulis jumpai dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, sehingga penulis terinspirasi untuk mengkaji tentang “Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia”. Dengan menggunakan studi kepustakaan penulis berharap lebih leluasa menemukan data-data temuan dari para peneliti sebelumnya. Dalam proses penyusunan tesis ini banyak pihak-pihak yang membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga sangat perlu bagi penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak terkait yang tentu tak akan mampu penulis sebutkan satu per satu. Namun demikian, kiranya penulis perlu mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Drs, KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ro’fah, BSW., MSW., Ph.D Selaku koordinator Program Pascasarjana (PPs) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ahmad Rafiq, M. Ag., M.A., Ph.D selaku sekretaris Program Pascasarjana (PPs) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Maragustam, M.A selaku dosen penasihat akademik sekaligus pembimbing tesis yang penuh kesabaran serta memotivasi penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.

6. Dr. H. Abdul Munip, M.Ag selaku dosen penguji yang dengan sabar membimbing penulis dalam perbaikan tesis ini sehingga penulis mampu menyelesaikan dengan baik.
7. Dosen-dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, ide-ide cemerlang demi menambah wawasan keilmuan para mahasiswa.
8. Kedua orang tua penulis, ibu sugini dan bapak suharto yang tiada lelah mendoakan dan senantiasa memberikan dukungan baik spiritual maupun materi yang sangat penulis butuhkan demi kelancaran dalam penyusunan tesis ini.
9. Adinda tersayang Dwi Haryanti, Amd.Keb yang tak lelah memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis mampu menyusun tesis ini dengan baik.
10. Mbak Cholifah, S.Pd.I, M.Pd.I (Soon), sesama pejuang tesis. Kakak yang selalu sabar menghibahkan telinga dan hatinya untuk adindanya tercinta. Terimakasih telah menjadi pendengar sekaligus supporter terbaik.
11. Teman-teman MKPI A, angkatan 2014 yang senantiasa memotivasi dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini
12. Saudari-saudari JBC (Jogja Be-Songo Community) mbak Fenty Fumiati, wanita tangguh, ditengah kesibukan menjadi seorang istri sekaligus ibu, tetap eksis dalam dunia bisnis dan masih sanggup menyelesaikan tesis, semoga segera di sidangkan. Adek Elysa Najachah, M.A, dosen cantik jelita yang multitalenta. Mbak Anna Khoiriyah, M.Si, dosen cantik nan baik hati. Terimakasih sudah menjadi teman, sahabat, saudara terbaik, selalu berusaha hadir dalam suka dan duka yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
13. *The last survivors* PAI (non reg) 2014. Mbak nurul, mb titik, mb wati, terimakasih sudah mensupport, mendoakan serta menemani perjuangan penulis dalam menyelesaikan tesis ini,

14.Mbak Marry Riana, Mas Arian Surya (Founder Pagar Kehidupan), Bpk. Chandra Putra Negara. Terimakasih atas video-videonya yang menginspirasi dan memotivasi.

Semoga segala jasa kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal oleh Allah swt. Tiada gading yang tak retak, tesis ini tentulah bukan karya tanpa cacat. Oleh karenanya penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat dijadikan jurukan untuk penelitian sejenis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Penulis,

Eko Puji Lestari, S.Pd.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kebijakan Pendidikan	13
a) Pengertian Kebijakan	13
b) Perumusan Kebijakan.....	17
c) Karakteristik Kebijakan Pendidikan	20
d) Fungsi Kebijakan Pendidikan	22
e) Implementasi Kebijakan Pendidikan	23
f) Evaluasi Kebijakan Pendidikan	28

	B. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	32
	a) Pengertian Pendidikan Inklusif	32
	b) Landasan Pendidikan Inklusif	34
	c) Tujuan Pendidikan Inklusif	38
	d) Model Pendidikan Inklusif	41
	e) Standar Nasional Pendidikan.....	42
	C. Guru Pendamping Khusus	48
	a) Guru Pendamping Khusus	48
	b) Peserta Didik Inklusif	52
BAB III	Latar Belakang Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Keadaan Guru Pendamping Khusus pada SMP Inklusif di Indonesia	
	A. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Indonesia.....	53
	B. Gambaran Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat SMP di Indonesia.....	60
	C. Keadaan Guru Pendamping Khusus Pada SMP Inklusif di Indonesia.....	70
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan	112
	B. Saran	115
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Siswa Inklusif dan Guru Pendamping khusus pada SMP inklusif di Indonesia.....	65
Tabel 2. Jumlah Siswa Inklusif dan GPK berdasarkan status sekolah.....	68
Tabel 3. Jumlah Siswa Tunanetra dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia...	69
Tabel 4. Jumlah Siswa Tunanetra dan GPK berdasarkan status sekolah.....	72
Tabel 5. Jumlah Siswa Tunarungu dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia...	73
Tabel 6. Jumlah Siswa Tunarungu dan GPK berdasarkan status sekolah.....	75
Tabel 7. Jumlah Siswa Tunagrahita Ringan dan Tunagrahita sedang dan GPK pada SMP inklusif di Indonesia.....	76
Tabel 8. Jumlah Siswa Tunagrahita Ringan dan Tunagrahita sedang dan GPK berdasarkan status sekolah.....	79
Tabel 9. Jumlah Siswa Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa sedang dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	80
Tabel 10. Jumlah Siswa Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa sedang dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	82
Tabel 11. Jumlah Siswa Tunalaras dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia...	83
Tabel 12. Jumlah Siswa Tunalaras dan GPK berdasarkan status sekolah.....	86
Tabel 13. Jumlah Siswa Tunawicara dan GPK pada SMP inklusif di Indonesia	87
Tabel 14. Jumlah Siswa Tunawicara dan GPK berdasarkan status sekolah.....	89
Tabel 15. Jumlah Siswa Hiperaktif dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia....	90
Tabel 16. Jumlah Siswa Hiperaktif dan GPK berdasarkan status sekolah.....	93
Tabel 17. Jumlah Siswa Cerdas Istimewa dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	94
Tabel 18. Jumlah Siswa Cerdas Istimewa dan GPK berdasarkan status sekolah	96
Tabel 19. Jumlah Siswa Bakat Istimewa dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	97
Tabel 20. Jumlah Siswa bakat Istimewa dan GPK berdasarkan status sekolah	100

Tabel 21. Jumlah Siswa kesulitan belajar dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	101
Tabel 22. Jumlah Siswa kesulitan belajar dan GPK berdasarkan status sekolah.	103
Tabel 23. Jumlah Siswa Korban Narkoba dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	104
Tabel 24. Jumlah Siswa Korban Narkoba dan GPK berdasarkan status sekolah	107
Tabel 25. Jumlah Siswa Indigo dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	108
Tabel 26. Jumlah Siswa Indigo dan GPK berdasarkan status sekolah	111
Tabel 27. Jumlah Siswa <i>Down Syndrome</i> dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia	112
Tabel 28. Jumlah Siswa <i>Down Syndrome</i> dan GPK berdasarkan status sekolah.	114
Tabel 29. Jumlah Siswa Autis dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	115
Tabel 30. Jumlah Siswa Autis dan GPK berdasarkan status sekolah	118
Tabel 31. Jumlah Siswa Tunaganda dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia	119
Tabel 32. Jumlah siswa Tunaganda dan GPK berdasarkan status sekolah.....	122

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Berkebutuhan Khusus
GPK	: Guru Pendamping Khusus
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
PDBK	: Peserta Didik Berkebutuhan khusus
PPI	: Program Pembelajaran Individual
BK	: Bimbingan Konseling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lebih dari 70th yang lalu Indonesia merdeka, sudah seharusnya tidak ada lagi warga Negara yang tidak dapat mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya, sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan mendasar dari kemerdekaan adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh sebab itu pendidikan termasuk unsur penting dalam sebuah tatanan negara.

Pendidikan merupakan pondasi dasar sebuah bangsa. Bangsa yang maju biasanya memiliki warga negara yang terdidik, begitu pula sebaliknya. Negara yang terbelakang biasanya memiliki warga negaranya juga terbelakang dalam hal pendidikan. Sebagaimana di katakana oleh Nelson Mandela “*Education is the most powerful weapon which you can use to change the world*”. Pendidikan merupakan senjata yang kuat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Betapa besarnya pengaruh pendidikan dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Selain itu pendidikan juga di nilai mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa itu sendiri. Oleh karenanya, mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga dan negara wajib membiayainya.

Dunia pendidikan Indonesia mengalami banyak permasalahan, mulai dari pemberantasan buta-huruf, angka putus sekolah, kenakalan remaja, hingga peluang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, terutama untuk para penyandang disabilitas. Amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

Pasal 5, Ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”¹ Kemudian pada ayat Ayat 2 disebutkan bahwa “warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”² Pasal 11 ayat 1 berbunyi, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.”³ Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”⁴

Jumlah anak usia pendidikan dasar dan menengah yang tidak sekolah masih tinggi di Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan, dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Selama ini penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas lebih banyak dilakukan di satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Padahal, tidak semua daerah di Indonesia memiliki SLB. Data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, 62 diantaranya tidak memiliki SLB. Jumlah 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesiapun baru 10 persen yang bersekolah di SLB. Project Manager Yayasan Cilik Wiwied Triesnadi mengatakan, ada beberapa penyebab yang melatari

¹ UU No 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, Ayat 1.

² UU No 20 Tahun 2003, Pasal 5, Ayat 2

³ UU No 20 Tahun 2003, Pasal 11, Ayat 1.

⁴ UU No 20 Tahun 2003, Pasal 5, Ayat 2.

persoalan itu. Sekitar 2.000 SLB di Indonesia, 75 persennya merupakan SLB swasta yang menarik biaya lebih mahal. Selain itu, penyebaran SLB menurut dia juga sangat terbatas. Lokasi SLB pada umumnya berada di daerah perkotaan. Hal ini berdampak pada akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. “Anak-anak yang kemampuan ekonomi keluarganya lemah terpaksa tidak bersekolah karena faktor biaya dan jarak,” ujar Wiwied saat di temui di Bandung, Jawa Barat, Senin (28/8).⁵

Demi mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan mengembangkan kebijakan non diskriminatif dalam bidang pendidikan serta pentingnya pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), maka pendidikan inklusif menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus di didik bersama-sama dengan anak normal lainnya untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak. Pendidikan inklusif harus mampu menyesuaikan diri dan fleksibel terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Fleksibilitas tersebut terkait dengan kurikulum, pendekatan pembelajaran, sistem evaluasi, serta mencerminkan pembelajaran yang ramah. Pendidikan inklusif diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mengakomodasi semua anak dengan melakukan berbagai penyesuaian, misalnya kurikulum, metode pembelajaran, materi dan bahan ajar, media pembelajaran, penilaian proses dan hasil belajar, pemeliharaan sarana dan prasarana, manajemen sekolah, bimbingan konseling, dan beberapa komponen lainnya berdasarkan pada

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170829083026-20-237997/satu-juta-anak-berkebutuhan-khusus-tak-bisa-sekolah> diakses 31 mei 2018

kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan inklusif mampu memberikan kemudahan bagi PDBK sesuai dengan kecerdasan intelektual mereka.⁶

Pendidikan inklusif telah lama menjadi rujukan bagi penyelenggaraan pendidikan di berbagai Negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan tujuan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif sendiri bertujuan memfasilitasi kebutuhan pendidikan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan peserta didik lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak permasalahan yang terjadi di beberapa lembaga penyelenggara pendidikan, terutama adalah ketersediaan guru pendamping khusus (GPK).

Oleh karena itu penulis memfokuskan kajian pada “Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Indonesia (tinjauan Sekolah Menengah Pertama)” dalam penyelenggaraannya tidak semua akan penulis bahas dalam kajian ini melainkan hanya beberapa point saja. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan hanya pada latar belakang munculnya kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia serta keadaan guru (kualifikasi dan ketersediaannya) pada SMP inklusif di Indonesia.

⁶ Dedy Kustawan, *Manajemen Pendidikan Inklusif*, (Jakarta: PT. Luxima Metro Media, 2013), hlm. 79

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia?
2. Bagaimana gambaran penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat SMP di Indonesia?
3. Bagaimana keadaan guru pendamping khusus pada SMP inklusif di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui latar belakang munculnya kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia
2. Mengetahui gambaran penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat SMP di Indonesia
3. Mengetahui keadaan guru pendamping khusus pada SMP inklusif di Indonesia

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang keilmuan, khususnya di bidang kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Serta layak dijadikan bahan rujukan untuk penelitian sejenis dan sebagai bahan informasi bagi para peneliti dalam bidang kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada umumnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi kampus

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan terkait kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia (tinjauan Sekolah Menengah Pertama).

b. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan pengalaman terkait kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia (Tinjauan Sekolah Menengah Pertama) dan sebagai bahan pengembangan khazanah keilmuan.

c. Bagi pembaca

Menambah wawasan informasi dan pengalaman terkait kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia (tinjauan Sekolah Menengah Pertama), serta hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian berikutnya

D. Kajian Pustaka

Pertama, tesis yang di tulis oleh Arian Sahidi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan secara empiris dan objektif bagaimana identifikasi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus.

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan untuk lima keperluan, yaitu: penjarangan (*screening*), pengalih-tanganan (*referral*), klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. (2) Ada 3 model pengembangan kurikulum yang digunakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu: model kurikulum umum (reguler), model kurikulum umum dengan modifikasi dan model kurikulum yang diindividualisasikan. (3) Tenaga pendidik di sekolah umum penyelenggara pendidikan inklusi terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan guru pendidikan khusus (GPK). (4) Sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dimana pendidikan inklusi diselenggarakan. Bila memang dibutuhkan, sekolah bisa mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Dinas Pendidikan Provinsi untuk memenuhi kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. (5) Kegiatan belajar mengajar untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan dengan beberapa cara yaitu: *integrated in the regular classroom, one to one teaching, small group, program khusus, dan therapy*.⁷

Kedua, artikel yang ditulis oleh Astri Hanjarwati dan Siti Aminah yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi” dalam jurnal INKLUSI (Pusat Layanan Difabel-UIN Sunan Kalijaga). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-naturalistik-formatif (*the qualitative-naturalistic-formative*). Lokasi penelitian dalam studi ini

⁷ Arian Sahidi, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)”. Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016

adalah sekolah inklusi di Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, serta organisasi difabel di Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini, yang ingin dikaji adalah evaluasi proses dan hasil program pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta. Unit analisis dalam studi ini adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Sekolah Inklusi di Kota Yogyakarta (guru dan pengelola), ABK atau siswa difabel, orangtua siswa difabel dan NGO/LSM yang berfokus pada isu difabel. Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa program pendidikan inklusi di kota Yogyakarta yang dilaksanakan melalui Peraturan Walikota No.47 tahun 2008 berlangsung dengan baik. Dengan adanya perwal ini, mendorong lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi para difabel. Berjalannya program pendidikan inklusi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dapat berjalan baik karena adanya dukungan Guru Pendamping khusus (GPK) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota dan *Resource Center* “pusat sumber” yang merupakan tempat koordinasi bagi pemerhati pendidikan inklusi. Walaupun demikian, Dinas Pendidikan Kota masih terus melakukan pembenahan diri agar program ini dapat menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya. Sosialisasi dan penyadaran akan adanya difabel yang berhak mendapatkan pendidikan juga terus diupayakan oleh dinas ke berbagai lini, termasuk masyarakat umum. Perbaikan program juga dilakukan pada aspek infrastruktur yang lebih aksesibel bagi para difabel.

Sampai saat ini tetap dilakukan sosialisasi dan juga penyadaran terhadap sekolah untuk menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Berdasarkan pada

kajian yang telah dilakukan, kebijakan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta perlu tetap dilanjutkan dengan melakukan berbagai perbaikan pada aspek manajemen implementasi agar *output* dan *outcome* yang dihasilkan semakin baik, dari segi jumlah dan kualitasnya.⁸

Ketiga, artikel karya Kamal Fuadi yang berjudul “Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam upaya mendeskripsikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan implementasi kebijakan di provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, *Pertama*, pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta cenderung untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) kedalam program sekolah. Walaupun peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga dimasukkan dalam salah satu peserta didik pendidikan inklusif, keberadaan mereka tidak banyak menjadi isu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak menggunakan model sebagaimana terdapat dalam literatur dan ketentuan umum pendidikan inklusif. Model hanya merupakan bagian dari strategi yang perlu diketahui dan dilaksanakan guru. *Ketiga*, belum semua kategori anak berkebutuhan khusus diterima menjadi peserta didik program pendidikan inklusif. Hal tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya sumber daya sekolah yang memadai. *Keempat*, penunjukkan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di provinsi DKI Jakarta melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah

⁸ Astri Hanjarwati dan Siti Aminah “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi”, jurnal INKLUSI, vol. I No.2 Juli-Desember 2014

pusat. *Kelima*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu bekerja sama dengan pihak sekolah dengan memberikan pelatihan bagi guru-guru inklusi, bantuan finansial, bantuan sarana dan prasarana, dan beasiswa bagi sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.⁹

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian noninteraktif (*non interactive inquiry*) disebut juga penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data, untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati sesuai dengan namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif atau melalui interaksi dengan sumber data manusia. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen.¹⁰ Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹¹ Menurut Abdur Rahman Sholeh, penelitian Kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.¹²

2) Sumber Data

⁹ Kamal Fuadi, “Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta” hlm. 24-25

¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 65

¹¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

¹² Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 63

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹³ Adapun data kepustakaan yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah, buku, jurnal, kebijakan, peraturan perundangan, berita online dan lain sebagainya yang menunjang dalam penelitian ini.

3) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis isi atau dokumen (*content or document analysis*) ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri atas tiga bagian yakni bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, persetujuan tim penguji, nota dinas pembimbing, surat pernyataan keaslian, surat pernyataan bebas plagiasi, halaman persembahan, motto, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar singkatan.

Bagian isi terdiri dari Bab-bab dan sub-bab. Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II berisi kajian teori, kebijakan

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 65

pendidikan, pengertian kebijakan, perumusan kebijakan, karakteristik kebijakan pendidikan, fungsi kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, evaluasi kebijakan pendidikan, latar belakang kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, standar pendidikan inklusif, pengertian pendidikan inklusif, landasan pendidikan inklusif tujuan pendidikan inklusif, model pendidikan inklusif, penyelenggaraan pendidikan inklusif yang meliputi, guru pendidikan khusus, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Bab III berisi latar belakang kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, Gambaran umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Indonesia (tinjauan Sekolah Menengah Pertama), keadaan guru pendamping khusus di SMP Inklusif di Indonesia. Bab IV berisi simpulan dan saran.

Bagian Penutup berisi daftar pustaka dan daftar riwayat hidup.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan inklusif di Indonesia lahir berdasarkan pengaruh dari berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau dunia internasional. Berikut merupakan latar belakang munculnya kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Internasional: Konvensi PBB tentang hak Anak, Konferensi Jomtingen 1990, Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat, Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus, Konferensi Dakar, Senegal. Pendidikan untuk Semua. Senegal, 2000. Nasional: Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 (Tentang penyandang cacat), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380/C.C6/MN/2003, 20 Januari 2003. (Perihal Pendidikan Inklusi), Deklarasi Bandung (Nasional) “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” (8-14 Agustus 2004), Deklarasi Bukittinggi (Internasional) Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

2. Gambaran Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat SMP Di Indonesia, secara keseluruhan penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Jenis ketunaan terbanyak di sekolah-sekolah SMP di Indonesia yaitu lamban belajar
- 2) Dari aspek manajemen kesiswaan, sekolah rata-rata belum mampu mengadakan identifikasi dan assesement, padahal hal ini penting untuk mengetahui ketunaan siswa.
- 3) Dari aspek manajemen kepegawaian atau pendidik, tidak semua sekolah inklusif memiliki GPK bahkan sekolah-sekolah SMP di Indonesia belum mampu menyediakan guru yang berkualifikasi sesuai bidangnya.
- 4) Dari aspek manajemen sarana prasarana, tidak semua sekolah mampu memenuhi kebutuhan sarpras yang dibutuhkan peserta didik. Sejauh ini masih menggunakan apa yang ada di sekolah.
- 5) Dari aspek manajemen keuangan sekolah-sekolah merasa memiliki keterbatasan dana. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
- 6) Dari aspek pelaksanaan pembelajaran belum sesuai dengan semestinya yakni pembelajaran masih dilakukan secara umum, jadi ABK menyesuaikan keadaan kelas bukan kelas yang mengikui keadaan ABK.
- 7) Dari aspek evaluasi pembelajaran dianggap rendah, hal ini di karnakan peserta didik ABK menggunakan standar kelulusan yang sama dengan siswa normal.
- 8) Dari sisi perencanaan pembelajaran khususnya dalam menyusun RPP, guru merasa kesulitan dalam menuangkan indikator dalam materi yang harus

disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik ABK. Demikian juga dalam menyiapkan bahan/materi dan sumber belajar

- 9) Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, guru merasa kesulitan dalam memberikan penilaian kepada ABK dikarenakan tidak adanya petunjuk dan panduan yang baku sehingga penilaian yang diberikan guru kepada ABK lebih bersifat subyektif.
 - 10) Dari aspek manajemen lingkungan, sekolah selalu melibatkan orang tua, artinya guru-guru selalu aktif berkomunikasi dengan orangtua ABK, dengan harapan bahwa terjalin kerjasama antar sekolah dengan orang tua siswa maka proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah akan tercipta dengan
3. Keadaan Guru Pendamping Khusus pada SMP inklusif di Indonesia, dalam implementasinya masih terdapat kekurangan guru, terutama GPK. Hal ini dikarenakan adanya kendala kurangnya sumber daya guru, khususnya GPK di daerah. Keberadaan mereka masih dirasakan menjadi masalah utama, khususnya bagi sekolah yang lokasinya jauh dari SLB, karena seringkali GPK merupakan guru SLB yang mendapat tugas khusus. Penugasan khusus guru SLB seringkali menjadi masalah karena kebijakan tentang hal ini belum berjalan semestinya.

Adanya kewajiban berupa tugas, tentunya juga harus dibarengi adanya hak yang harus diperoleh oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) menyangkut pelaksanaan tugas-tugasnya. GPK perlu pengakuan atas tugas yang dilaksanakan, baik berupa SK sebagai GPK dari dinas terkait dalam hal ini

Dinas Pendidikan setempat. Selanjutnya juga pengakuan atas jam mengajar di sekolah inklusi yang berhubungan langsung dengan Angka Kredit sebagai bahan untuk kenaikan pangkat. Disisi lain, GPK disamping bertugas di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai sekolah induknya, mereka juga harus datang ke sekolah inklusi yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun jenis siswa berkebutuhan khusus yang menjadi siswa inklusif yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunadaksa ringan, tunadaksa sedang, tunalaras, tunawicara, hiperaktif, cerdas istimewa, bakat istimewa, kesulitan belajar, korban narkoba, indigo, *down syndrome*, autisme, dan tunaganda.

B. Saran

1. Mengingat panjangnya proses lahir sebuah kebijakan, maka di harapkan Kebijakan inklusif di Indonesia perlu andil lebih banyak dari pemerintah serta peran serta masyarakat dalam proses implementasi serta evaluasi kebijakan tersebut. Agar tercapai cita-cita dan harapan bangsa.
2. Diharapkan pihak penyelenggara pendidikan inklusif mengikuti pedoman yang ada dalam proses penyelenggaraan pendidikan hal ini di karenakan banyaknya temuan yang menggambarkan bahwa banyak penyelenggara pendidikan yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan. Peran serta dari pemerintah dan masyarakat sangat berarti disini.
3. Diharapkan pendidikan khusus menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa terutama bidang pendidikan, hal ini di harapkan agar semua calon guru (sarjana

pendidikan) siap ditempatkan dimanapun dan mampu menghadapi berbagai jenis peserta didik yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung:Alfabeta: 2014.
- Amtu, Onisimus, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah Konsep, strategi dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Baktiar, Yoyon Irianto, *Kebijakan Pembaran Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Baihaqi, MIF dan M Sugiarmmin, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, Bandung:PT. Refika Aditama, 2006.
- David, J Smith, *Sekolah Inklusif: Konsep dan Penerapan Pembelajaran*, terj. Denis Enrica, Bandung: Nuansa Cendekia, 2014.
- E. James Anderson, *Public Policy Making*. Newyork: holt, Rinehart dan Wiston, 1984.
- Fattah, Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Handayani, Titik dan Angga Sisca Rahadian, *Peraturan dan Implementasi Pendidikan Inklusif*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 39, No.1, Juni 2013.
- Hermanio, Agustinus, *Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kustawan, Dedy, *Manajemen Pendidikan Inklusif*, Jakarta: PT. Luxima Metro Media, 2013
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Masngud, dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press, 2010.
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rahman, Abdul Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Raharjo, Mudjia, *Pemikiran Kebijakan pendidikan* Malang: UIN Maliki Press, 2010.

- Rohman, Arif dan Teguh Wiyono, *Education Policy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rohman, Arif, *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- Rusdiana, H.A. *Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Sari, Eka Setianingsih dan Ari Widyaningrum, *Evaluasi Pendidikan Inklusif tingkat SMP di Jawa Tengah*, Seminar Nasional Hasil Penelitian (SNHP)-VII Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas PGRI Semarang. 2017
- Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2008.
- Subarsono, A.G, *Analisis Kebijakan Publik* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Suyanto dan Mudjito, *Masa depan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, 2012.
- Takdir, Mohammad Ilahi, *Pendekatan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013.
- Tarmansyah, *INKLUSI: Pendidikan Untuk Semua*, Jakarta: DEPDIKNAS dirjen Pendidikan tinggi Direktorat Ketenagaan, 2007.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan, Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik, teori, proses dan studi kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Ermawati, *Mengenal Lebih Jauh Sekolah Inklusi: Pedagogik Jurnal Pendidikan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Fuadi, Kamal, “*Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta*”
- Joni, M. Yulianto, *Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusif*. Jurnal INKLUSI Vol 1, No. 1 Januari- Juni 2014.
- Hanjarwati, Astri dan Siti Aminah “*Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi*”, jurnal INKLUSI, vol. I No.2 Juli-Desember 2014

- Sahidi, Arian, *“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)”*. Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016
- Sari, Eka Setianigsih dan Ari Widyaningrum, *“Evaluasi Pendidikan Inklusi Tingkat SMP Di Jawa Tengah”*.
- Depdiknas, PLB, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007.
- Depdiknas, PLB, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007.
- Kemendikbud, *Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia (tinjauan Sekolah Menengah Pertama) tahun 2016*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur*, Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2012.
- Permendiknas RI No.70, Tahun 2009
- Seminar Nasional Hasil Penelitian (Snhp)-Vii. *“Evaluasi Pendidikan Inklusi Tingkat Smp Di Jawa Tengah”*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Pgri Semarang. Semarang, 26 Oktober 2017.
- UU No 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, Ayat 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170829083026-20-237997/satu-juta-anakberkebutuhan-khusus-tak-bisa-sekolah> diakses 31 mei 2018
- <http://www.kajian-teori.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakanpendidikan.html>
- <http://fidiupiserang.blogspot.com/2014/10/landasan-pendidikan-inklusif.html> diakses 4 juli 2018
- <https://www.harianhaluan.com/news/detail/46562/guru-pembimbing-khusus-dalam-inklusi> diakses 21 Agustus 2018

pepenk26.blogspot.com/2015/02/kebijakan-pendidikan-inklusi-di.html diakses 29
Agustus 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Eko Puji Lestari, S.Pd.I
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat/tgl. Lahir : Kotawaringin Barat, 13 Februari 1990
Alamat Rumah : Jl. A.Yani Km.75, Desa. Amin Jaya, Rt.10, Rw.02.
Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat
Kota. Pangkalan Bun
Provinsi. Kalimantan Tengah. 74183
Nama Ayah : Suharto
Nama Ibu : Sugini
Email : puputsuharto.ps@gmail.com
No. Hp : 085728953223

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. TK Melati, Amin Jaya, Kalteng : Tahun 1994-1996
2. SDN 1 Amin Jaya, Kalteng : Tahun 1996-1999
3. SDN 3 Karanganyar Demak, : Tahun 1999
4. SDN 1 Mojodemak : Tahun 1999-2001
5. MI Miftahul Ulum Jogoloyo Demak : Tahun 2001-2002
6. MTs NU Jogoloyo Demak : Tahun 2002-2005
7. MA Darul Muttaqin, : Tahun 2005-2007
8. MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus : Tahun 2007-2008
9. S1 IAIN Walisongo Semarang : Tahun 2008-2013
10. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 2014-2018

b. Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Miftahul Huda, Karanganyar Demak : Tahun 1999
2. TPQ Fadhlul Mujib, Karanganyar Demak : Tahun 1999
3. Madrasah Diniyah Mojodemak : Tahun 2000-2001
4. Pon-Pes Tasyri'iyah 'Alawiyah, Jogoloyo Demak : Tahun 2001-2005
5. Pon-Pes Darul Muttaqin, Kalteng : Tahun 2005-2007
6. Pon-Pes Darul Falah Be-Songo, Semarang : Tahun 2008-2013
7. Kursus Bahasa Arab WLC (Walisongo Language Center): Tahun 2010
8. Kursus Bahasa Arab AL-FARISI, Pare Kediri : Tahun 2011
9. Kursus Bahasa Arab OCEAN, Pare Kediri : Tahun 2011
10. Kursus Bahasa Arab AL-BUSAYYITH, Pare Kediri : Tahun 2011
11. Kursus Bahasa Inggris HEC 1, Pare Kediri : Tahun 2013
12. Kursus Bahasa Inggris BEC, Pare Kediri : Tahun 2014
13. Kursus Bahasa Inggris ELFAST, Pare Kediri : Tahun 2014
14. Kursus Bahasa Inggris KRESNA, Pare Kediri : Tahun 2011
15. Sekolah Gender UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : Tahun 2016

C. Pelatihan-pelatihan (yang pernah diikuti)

1. Training Bahasa Arab Persiapan studi ke Timur Tengah, tahun 2008
2. Pendidikan dan Latihan Dasar Gabungan (DIKLATSARGAB) Kepalangmerahan oleh KSR PMI Unit IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan PMI Cabang Kota Semarang, tahun 2008
3. Pelatihan PSP (*Psikososial Support Program*), RFL (*Restoring Family Links*) dan Posko Bencana, oleh PMI Cabang Kota Semarang, tahun 2009

4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Resolusi Konflik bagi Pondok Pesantren di Jawa Tengah oleh Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang, tahun 2012
5. Pelatihan Bimbingan *Muqri'* (Pengajar) *YANBU'A*, tahun 2017

D. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Les Privat SD tahun 2017
2. Guru Tahsin SMP BUDI MULIA DUA Yogyakarta, tahun 2017-2018
3. Henna Artist 2015-sekarang

E. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, tahun 2009
2. Danru III KSR PMI UNIT Walisongo Semarang, tahun 2009
3. Bendahara di IMB (Ikatan Mahasiswa Borneo) IAIN Walisongo Semarang, tahun 2010
4. Bendahara di Pon-Pes Darul Falah Besongo Semarang, tahun 2011

Yogyakarta, Agustus 2018

(Eko Puji Lestari, S.Pd.I)